

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

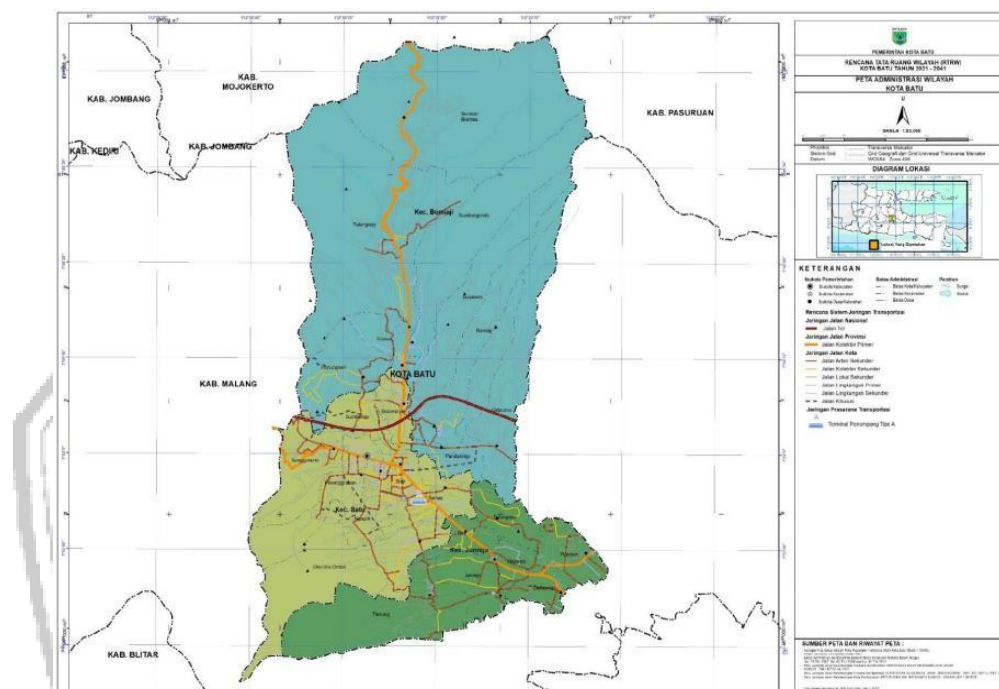
3.1 GAMBARAN UMUM KOTA BATU

3.1.1 Kondisi Geografis dan Topografis

Kota Batu merupakan daerah otonom di Provinsi Jawa Timur terbentuk pada tahun 2001 menurut Undang-Undang tahun 2001 yang berada pada kawasan pegunungan dengan karakter ekologis yang khas. Secara geografis, kota ini terletak pada koordinat $7^{\circ}44'-8^{\circ}26'$ LS dan $122^{\circ}17'-122^{\circ}57'$ BT, dengan luas sekitar 202,30 km². Seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang, sehingga Kota Batu menjadi bagian penting dalam lingkup kawasan Malang Raya. Kedudukan tersebut turut mendorong perkembangan Kota Batu sebagai pusat aktivitas perkotaan, pariwisata, sekaligus kawasan permukiman yang terus mengalami peningkatan kepadatan. Dari aspek topografi, Kota Batu didominasi oleh dataran tinggi dan lereng perbukitan dengan ketinggian antara 680 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikelilingi oleh beberapa gunung seperti, Arjuno, Welirang, Panderman. Karakteristik geografis dan topografis Kota Batu mempengaruhi pola iklim pegunungan yang ditandai dengan suhu harian yang relatif stabil antara 15°C hingga 25°C dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun, sehingga menciptakan kondisi iklim yang khas. Curah hujan juga relatif besar, terutama pada periode November hingga Maret ketika angin lembap tertahan oleh jajaran pegunungan di sekitar kota. Pola iklim ini menciptakan lingkungan yang subur dan mendukung pengembangan komoditas hortikultura, seperti apel, bunga hias, dan berbagai jenis sayuran yang menjadi ciri khas pertanian Kota Batu.

Selain pertanian, Kota Batu juga dikenal sebagai kota wisata. Lingkungan alam yang menarik, udara sejuk, serta keberadaan berbagai objek wisata buatan dan

alam menjadikan sektor pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. Aktivitas wisata ini mendorong pertumbuhan sektor jasa, kuliner, akomodasi, serta transportasi. Pesatnya perkembangan pariwisata juga berpengaruh pada perubahan tata ruang dan dinamika sosial, termasuk meningkatnya pembangunan permukiman, usaha mikro, serta fasilitas publik.



Gambar 3. 1 Peta Administratif Kota Batu

Sumber : RTRW Kota Batu Tahun 2022-2042

Dapat diamati pada gambar 3.1 peta wilayah Kota Batu, secara administratif Kota Batu terdiri atas tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Luas wilayah Kecamatan Bumiaji tercatat sebesar 12.797,89 ha, menjadikannya kecamatan terluas di wilayah ini. Sementara itu, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo memiliki luas wilayah masing-masing sebesar 4.545,81 ha dan 2.565,02 ha. Ketiganya memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang berbeda, mulai dari kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi hingga wilayah dataran tinggi yang bercorak agraris. Kombinasi karakteristik rural dan urban memberikan keunikan tersendiri pada struktur ekonomi dan pola permukiman di kota ini. Secara geografis, batas wilayah Kota Batu, meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan

Kabupaten Pasuruan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang.

Peta administratif Kota Batu memperlihatkan struktur spasial wilayah yang memanjang dari utara hingga selatan dengan batas geografis yang jelas. Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo, yang selanjutnya membawahi 24 desa/kelurahan, 3 kecamatan, 19 desa, 5 Kelurahan. Pembagian wilayah tersebut tersusun hingga tingkat permukiman dengan 1.127 Rukun Tetangga (RT) dan 238 Rukun Warga (RW). Peta juga menunjukkan sebaran aliran sungai yang cukup rapat di seluruh wilayah, menandakan karakter hidrologis khas daerah pegunungan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Pola aliran sungai tersebut sejalan dengan kontur wilayah yang berbukit dan berpengaruh pada ekosistem pertanian serta kebutuhan air bersih masyarakat. Secara keseluruhan, peta Kota Batu menampilkan struktur ruang yang kompleks, meliputi kawasan pertanian, permukiman, pusat wisata, dan jaringan transportasi yang saling terhubung. Keragaman spasial ini mencerminkan karakter Kota Batu sebagai kota pegunungan yang berkembang menjadi pusat pariwisata dan aktivitas ekonomi. Analisis peta administratif tersebut memberikan gambaran penting mengenai dinamika keruangan Kota Batu yang menjadi dasar bagi perencanaan wilayah dan pengelolaan lingkungan.

3.1.2 Kondisi Demografi

Profil demografi Kota Batu menyajikan gambaran komprehensif tentang karakteristik penduduk yang menghuni kota wisata ini. Sebagai entitas otonom yang berkembang pesat, terutama dalam sektor pariwisata dan jasa, dinamika penduduk Kota Batu menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkesinambungan. Aspek demografi menjadi krusial dalam menentukan kebutuhan pelayanan publik, perencanaan tata ruang, serta orientasi pembangunan daerah yang efektif. Data demografi Kota Batu tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk mencapai 225.408 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101

yang mengindikasikan dominasi penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,62 persen per tahun sejak 2020 menunjukkan adanya peningkatan penduduk yang stabil. Kepadatan penduduk Kota Batu tercatat sebesar 1.161 jiwa/km², dengan variasi kepadatan yang signifikan di antara kecamatan-kecamatan, yaitu Kecamatan Batu sebagai kecamatan dengan kepadatan tertinggi dan Kecamatan Bumiaji sebagai kecamatan dengan kepadatan terendah (Badan Pusat Statistik Kota Batu 2024).

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Batu, 2024

Kelompok Umur	Laki - laki	Perempuan
0-4	7.200	7.000
5-9	7.000	6.900
10-14	6.800	6.700
15-19	6.500	6.600
20-24	6.300	6.400
25-29	6.200	6.300
30-34	6.100	6.200
35-39	6.000	6.000
40-44	6.300	6.100
45-49	5.800	5.900
50-54	5.600	5.700
55-59	5.300	5.400
60-64	4.800	4.900
65-69	4.200	4.300
70-74	3.500	3.700
75+	2.800	3.000

sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

Struktur penduduk Kota Batu membentuk piramida yang melebar pada kelompok usia muda dan semakin menyempit pada kelompok usia lanjut. Pola ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk masih didominasi oleh usia produktif dan pra-produktif. Pada kelompok umur 0-4 tahun, jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang, masing- masing sekitar 7 ribu jiwa, yang mengindikasikan tingkat kelahiran yang stabil. Pada kelompok umur 5-14 tahun, jumlah penduduk mulai sedikit menurun, tetapi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan masih terlihat jelas. Pola ini tetap konsisten hingga kelompok umur 15-24 tahun, menandakan tidak adanya perbedaan bermakna antara kedua jenis kelamin dalam kelangsungan

hidup pada rentang usia muda. Kelompok umur 20–44 tahun menunjukkan jumlah penduduk yang relatif konstan dan menjadi kelompok yang paling dominan dalam struktur penduduk Kota Batu. Dominasi usia produktif ini menandakan ketersediaan tenaga kerja yang kuat serta tingginya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap layanan sanitasi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan fasilitas permukiman menjadi semakin penting. Besarnya proporsi usia produktif juga mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan sanitasi berbasis masyarakat (STBM), karena kelompok inilah yang berperan signifikan sebagai penggerak utama dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pada rentang ini, jumlah laki-laki dan perempuan relatif sama, berada pada kisaran 6.000–6.300 jiwa. Kondisi tersebut menggambarkan potensi tenaga kerja yang kuat dan dapat mendorong berbagai sektor ekonomi daerah, termasuk pariwisata, perdagangan, dan jasa. Memasuki usia 45 tahun ke atas, jumlah penduduk menurun secara bertahap. Penurunan ini semakin tajam pada kelompok umur 60 tahun ke atas, mencerminkan penyusutan alami pada kelompok lansia. Meski begitu, perempuan terlihat sedikit lebih banyak pada usia 70 tahun ke atas, sesuai kecenderungan umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup lebih panjang dibanding laki-laki. Secara keseluruhan, struktur penduduk Kota Batu menunjukkan komposisi usia yang relatif muda dan produktif, serta pola gender yang stabil di hampir semua kelompok umur.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kota Batu, 2024

Kegiatan Utama	Laki – Laki	Perempuan	Laki - Laki dan Perempuan
A. Angkatan Kerja	76.528	51.942	128.470
1. Bekerja	73.519	50.284	123.803
2. Pengangguran Terbuka	3.009	1.658	4.667
B. Bukan Angkatan Kerja	11.103	35.133	46.236
1. Sekolah	5.537	7.321	12.858
2. Mengurus Rumah Tangga	2.523	25.847	28.370
3. Lainnya	3.043	1.965	5.008
Jumlah	87.631	87.075	174.706

Struktur ketenagakerjaan pada tabel 3.3 menurut data BPS tahun 2024, penduduk Kota Batu yang berusia 15 tahun ke atas berjumlah 174.706 jiwa, dengan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128.470 jiwa tergolong sebagai angkatan kerja, yang terdiri dari 76.528 laki-laki dan 51.942 perempuan. Mayoritas dari angkatan kerja ini telah bekerja, yaitu sebanyak 123.803 jiwa, dengan tingkat partisipasi kerja yang tinggi. Laki-laki mendominasi kelompok bekerja dengan jumlah 73.519 jiwa, sedangkan perempuan yang bekerja tercatat 50.284 jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka mencapai 4.667 jiwa, yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran relatif rendah. Pada kategori bukan angkatan kerja, tercatat sebanyak 46.236 jiwa, dengan perempuan mendominasi pada kegiatan mengurus rumah tangga. Sementara itu, kategori bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga. Distribusi kegiatan berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sedangkan perempuan lebih dominan pada kegiatan domestik.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Batu, 2020 - 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Per Tahun 2020 - 2024 (%)
Batu	102.698	0,45
Junrejo	57.991	1,06
Bumiaji	64.719	0,49
Kota Batu	225.408	0,62

Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2025

Hasil analisis dari tabel 3.4 jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk perkecamatan di Kota Batu jumlah penduduk mencapai 225.408 jiwa, dengan distribusi yang tidak merata di tiga kecamatan. Kecamatan Batu memiliki penduduk terbanyak, yaitu 102.698 jiwa, karena perannya sebagai pusat pemerintahan, wisata, dan komersial. Kecamatan Bumiaji memiliki 64.719 jiwa penduduk, dengan kepadatan relatif rendah karena wilayah perbukitan dan pertanian. Kecamatan Junrejo memiliki 57.991 jiwa penduduk dan mengalami perkembangan pesat

sebagai wilayah transisi antara Kota Batu dan Kota Malang. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batu secara keseluruhan adalah 0,62%, dengan pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Junrejo sebesar 1,06%, yang mengindikasikan tingginya migrasi masuk dan intensifikasi pembangunan permukiman. Kecamatan Bumiaji memiliki laju pertumbuhan 0,49%, sedangkan Kecamatan Batu memiliki pertumbuhan paling rendah sebesar 0,45%.

Pola distribusi dan pertumbuhan penduduk di Kota Batu menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata yang intensif cenderung mengalami tekanan kepadatan penduduk yang signifikan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas lingkungan permukiman, ketersediaan infrastruktur dasar, dan kebutuhan pengelolaan sanitasi yang efektif. Dalam konteks ini, dinamika pertumbuhan penduduk dan peningkatan kepadatan penduduk menjadi faktor penting dalam memahami tantangan implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang efektif untuk memastikan akses sanitasi yang aman, layanan pemukiman yang berkelanjutan, dan pengawasan lingkungan yang partisipatif.

Tabel 3. 4 Jumlah Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kecamatan di Kota Batu 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²
Batu	45,56	2.412,45
Junrejo	25,73	1.836,90
Bumiaji	28,71	539,24
Kota Batu	100,00	1.160,88

Sumber : Kota Batu Dalam Angka 2025

Data pada tabel 3.5 Distribusi penduduk Kota Batu pada periode 2020-2024 menunjukkan perbedaan signifikan antar-kecamatan dalam hal komposisi penduduk dan tingkat kepadatan wilayah. Kecamatan Batu memiliki penduduk terbesar, yaitu 45,56% dari total populasi, dengan kepadatan penduduk tertinggi sekitar 2.412 jiwa/km². Hal ini mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi,

pariwisata, dan pusat pelayanan publik di wilayah tersebut. Kecamatan Junrejo menempati urutan kedua dengan 25,73% penduduk dan kepadatan 1.836,90 jiwa/km², dengan intensitas mobilitas dan pembangunan permukiman yang meningkat. Sementara itu, Kecamatan Bumiaji memiliki kontribusi penduduk sebesar 28,71%, namun dengan kepadatan yang relatif rendah, yaitu 539,24 jiwa/km², karena dominasi lahan pertanian, hutan lindung, dan kawasan perbukitan.

Analisis perbedaan kepadatan penduduk antar-kecamatan di Kota Batu menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan tinggi memiliki kebutuhan infrastruktur dasar yang lebih besar dan lebih rentan terhadap permasalahan kesehatan lingkungan. Dalam konteks ini, penerapan pendekatan *co-production* dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi sangat relevan. Keterlibatan aktif masyarakat, kader kesehatan, dan pemangku kepentingan lokal sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi STBM di wilayah padat penduduk. Melalui *co-production*, proses perencanaan, pemantauan, dan pemeliharaan sanitasi dapat dibangun sebagai tanggung jawab bersama, sehingga program tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah tetapi juga partisipasi warga yang berkelanjutan.

3.1.3 Visi dan Misi Kota Batu

Visi

Kota Batu Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi,
Akomodatif, dan Ekologis Menuju Generasi Emas 2045

Misi

1. Membangun Masyarakat yang Berdaya dan Berkarakter Berbasis Budaya dan Jati Diri Daerah.
2. Mengembangkan Ekonomi Daerah Berbasis Agro-Kreatif Didukung Infrastruktur Integratif Berwawasan Lingkungan.
3. Mengendalikan Pembangunan Ruang Kota, Konservasi Hutan dan Sumber Daya Air.
4. Membangun Tata Kelola Berintegritas, Kolaboratif, dan Inovatif Didukung Penguatan Desa dan Kelurahan.

3.1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA BATU

Dinas Kesehatan Kota Batu lembaga perangkat daerah yang berperan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana teknis yang membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan, menjalankan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Fokus utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui berbagai upaya yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Dinas Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan sejumlah program strategis, seperti pengendalian penyakit menular dan tidak menular, penyediaan pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan, peningkatan status gizi masyarakat, serta pengawasan terhadap kesehatan lingkungan, keamanan pangan dan minuman. Lembaga ini juga berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten, pengembangan sistem informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat terkait kesehatan lingkungan dan sanitasi.

Kantor Dinas Kesehatan Kota Batu berlokasi di Balai Kota Among Tani, Gedung B lantai 2, di Jl. Samadi No. 71, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota batu, Provinsi Jawa Timur yang berfungsi sebagai pusat koordinasi kebijakan dan program kesehatan tingkat kota. Posisi ini cukup strategis karena berada di pusat pemerintahan kota, sehingga mempermudah koordinasi lintas sektor serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan maupun informasi publik. Selain sebagai pusat administrasi, kantor ini juga menjadi tempat koordinasi utama bagi seluruh puskesmas, laboratorium kesehatan, dan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan dinas.

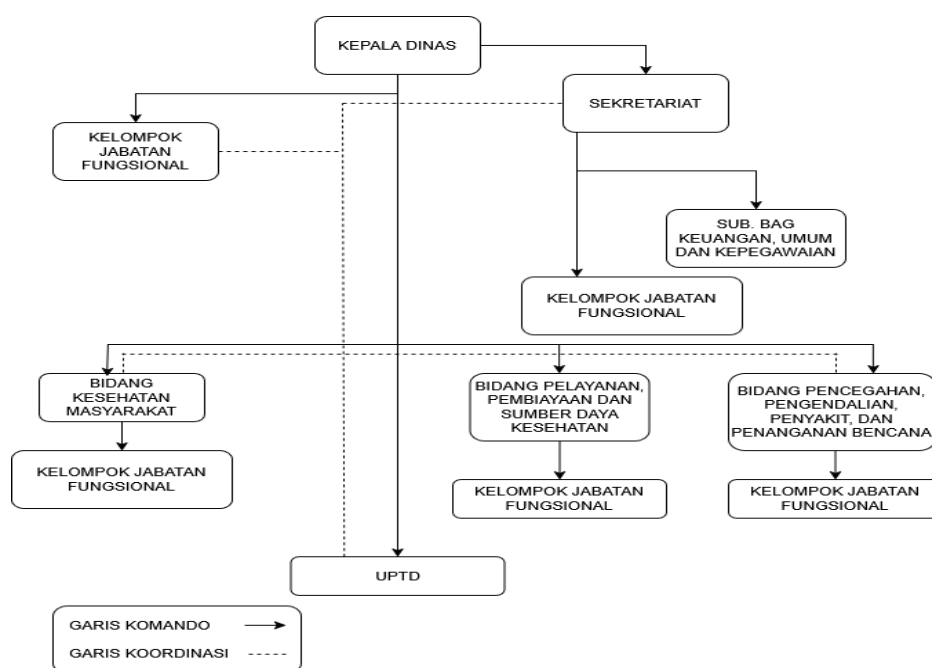
Melalui berbagai program dan inovasi, Dinas Kesehatan Kota Batu berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Peran strategis tersebut menjadikan Dinas Kesehatan sebagai salah satu pilar utama

dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batu secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Batu, Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai perangkat daerah yang berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, dinas ini juga menjalankan sejumlah fungsi strategis yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Perumusan rencana startegis sesuai visi dan misi Walikota
3. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang kesehatan
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan
5. Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia aparatur dinas
6. Penyelenggaraan administrasi dinas
7. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kesehatan
8. Pemberian rekomendasi atas pengurusan perijinan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayah Kota Batu
9. Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus yang ada di wilayah Kota Batu
10. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Batu dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam bidang kesehatan. Struktur ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kota Batu 2023 – 2026

a) Kepala Dinas

Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui perencanaan dan evaluasi yang efektif.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah koordinasi Kepala Dinas. Sekretariat berperan dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian seluruh proses administrasi dinas, termasuk urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, serta pengelolaan keuangan. Fungsi utama sekretariat meliputi penyusunan kebijakan program dan anggaran, pelayanan administrasi umum, fasilitasi pengembangan kepegawaian, pengelolaan aset, tata usaha rumah tangga dinas, layanan hubungan masyarakat, manajemen data kesehatan, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian pelaksanaan program, pengelolaan kearsipan, serta monitoring dan evaluasi tata laksana organisasi.

Sekretariat juga menjalankan fungsi tambahan sesuai penugasan Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat membawahi Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian. Sub bagian ini bertanggung jawab menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan kebijakan, mendukung penyusunan program dan anggaran, serta mengelola administrasi surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan kantor, dan urusan rumah tangga dinas. Selain itu, sub bagian ini mengoordinasikan penghapusan aset, menyusun laporan inventaris, melaksanakan administrasi kepegawaian, memfasilitasi penataan kebutuhan dan penempatan pegawai, serta mengelola administrasi keuangan dan aset. Sub bagian juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dalam bidang keuangan, umum, dan kepegawaian. Dengan demikian, sub bagian tersebut memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran tata kelola administrasi Dinas Kesehatan Kota Batu.

c) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pemberdayaan kesehatan masyarakat, serta penyehatan lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang berperan dalam pelaksanaan teknis di masing-masing subbidang.

Secara fungsional, Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan yang mencakup perencanaan program kesehatan masyarakat, perumusan kebijakan pada bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan olahraga. Selain itu, bidang ini bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan program, membina pelaksanaan promosi kesehatan, serta menyusun standar operasional prosedur untuk memastikan penyelenggaraan layanan berjalan sesuai ketentuan.

Fungsi lainnya meliputi pengelolaan dan pengendalian data kesehatan masyarakat, pengawasan pelaksanaan program, serta fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi pada seluruh subbidang terkait. Bidang Kesehatan Masyarakat juga

berwenang menyusun rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan kegiatan promosi kesehatan, gizi masyarakat, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja. Selain itu, bidang ini melaksanakan advokasi kesehatan kepada lintas sektor guna mendukung keberhasilan program. Pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan program juga menjadi bagian penting dari tugas Bidang Kesehatan Masyarakat. Di luar fungsi-fungsi tersebut, bidang ini menjalankan tugas tambahan sesuai penugasan Kepala Dinas dalam lingkup tugasnya.

d) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini memiliki tugas utama merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait surveilans dan imunisasi, pencegahan serta pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, serta pelayanan kesehatan jiwa. Pelaksanaan tugasnya didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang menangani kegiatan teknis sesuai kompetensi.

Dalam menjalankan fungsinya, bidang ini melaksanakan perencanaan program, perumusan kebijakan pada bidang surveilans, imunisasi, penanganan bencana, pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan khusus. Bidang ini juga mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan program serta memberikan pembinaan terhadap kegiatan surveilans epidemiologi, imunisasi, penanganan bencana, dan pengendalian penyakit. Selain itu, bidang ini bertanggung jawab menyusun standar operasional prosedur, mengelola dan mengendalikan data informasi penyakit, serta menyusun strategi pencegahan dan penanganan bencana. Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan pada layanan kesehatan khusus, termasuk pelayanan kesehatan bagi lansia dan kelompok usia produktif. Bidang ini turut mengoordinasikan kerja sama lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan surveilans, imunisasi, penanganan bencana, serta pengendalian penyakit. Selain koordinasi, bidang ini melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program sebagai bagian dari pengendalian kebijakan. Di samping itu, bidang ini menjalankan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

lingkup kewenangannya.

e) Bidang Pelayanan, Pembiayaan, dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Pelaksanaan tugasnya didukung oleh kelompok jabatan fungsional.

Fungsi utama bidang ini meliputi perencanaan program, perumusan kebijakan pelayanan, pembiayaan, sumber daya kesehatan, kefarmasian, serta pengawasan keamanan pangan. Selain itu, bidang ini mengoordinasikan kebijakan program, membina pelaksanaan pelayanan dan pembiayaan kesehatan, serta menyusun standar operasional prosedur pada seluruh subbidang terkait. Bidang ini juga mengelola data informasi pelayanan dan sumber daya kesehatan, menyusun rekomendasi perizinan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan industri pangan rumah tangga, serta mengawasi pelaksanaan pelayanan, pembiayaan, dan kefarmasian. Monitoring, evaluasi, pelaporan program, serta tugas tambahan lainnya dilakukan sesuai penugasan Kepala Dinas.

f) UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Batu berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional yang memberikan pelayanan publik dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. UPTD Puskesmas memiliki wilayah kerja yang mencakup beberapa desa atau kelurahan dalam satu kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional kesehatan dengan tugas tambahan sebagai pengelola manajemen puskesmas.

Kepala UPTD Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Adapun UPTD yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Batu meliputi:

- a. Puskesmas Batu
- b. Puskesmas Junrejo

- c. Puskesmas Beji
- d. Puskesmas Bumiaji
- e. Puskesmas Sisir

UPTD tersebut menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dan berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang subkoordinator yang bertugas mengarahkan pelaksanaan layanan fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Penetapan subkoordinator dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui usulan Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, subkoordinator berperan mendukung Pejabat Administrator dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansi sesuai pengelompokan fungsi.